

Polarisasi Keruangan Kabupaten Pelalawan: Analisis Geografis Ketersediaan Infrastruktur, Pola Pemukiman, dan Hierarki Tempat Sentral

Haura Fathia Chefany^{1*}, Tiara Fajar Hartati¹, Melsa Chania¹, Silvi Sudarsih¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1934>

Article Info:

Received : 30 April 2026
Revised : 05 Mei 2026
Accepted : 15 Mei 2026
Published : 22 Mei 2026

Correspondence:

Haura Fathia Chefany

Phone: +6282385044487

Abstract: This study aims to evaluate the availability of regional facilities and infrastructure, map the characteristics of settlement patterns, and analyze the position and functional interactions of villages within the urban system of Pelalawan Regency. The research employed a mixed methods approach, combining quantitative and qualitative descriptive analyses based on Geographic Information Systems (GIS). Data collection was conducted through three main techniques: literature review of official statistical documents such as Pelalawan Regency in Figures, field surveys (ground truthing), and structured interviews with key informants. The results of the spatial analysis using buffering modeling revealed significant disparities in the availability of public service facilities and the quality of road infrastructure among districts. The settlement patterns in Pelalawan Regency were identified into three main typologies, namely linear patterns following major road networks, linear patterns along the Kampar River, and agglomerated patterns surrounding plantation industrial areas or economic activity centers. Furthermore, based on the Scalogram Analysis and Village Development Index (VDI), the regional hierarchical structure in Pelalawan Regency is dominated by Pangkalan Kerinci District as the primary growth center (Hierarchy I), supported by 28 types of public service facilities. The resulting regional interaction pattern tends to reflect the characteristics of a primate city, where peripheral regions (Hierarchy III) remain highly dependent on the urban center. These findings highlight the importance of redistributing service functions and developing equitable connectivity infrastructure to achieve a balanced and sustainable urban system in Pelalawan Regency.

Keywords: Spatial Analysis; Pelalawan Regency; Settlement Characteristics; Facilities and Infrastructure; Urban System.

Citation: Fathia, H., Fajar Hartati, T., Chania, M., & Sudarsih, S. (2026). Polarisasi Keruangan Kabupaten Pelalawan: Analisis Geografis Ketersediaan Infrastruktur, Pola Pemukiman, dan Hierarki Tempat Sentral. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1652-1671. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1934>

Pendahuluan

Kabupaten Pelalawan termasuk salah satu daerah yang merasakan perkembangan pesat dalam sistem perkotaan, menghadapi tantangan yang rumit terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pola pemukiman, serta karakteristik desa. Perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, urbanisasi, dan kenaikan jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan terhadap infrastruktur yang layak. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti

jalan, transportasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan termasuk faktor penting guna menunjang kualitas hidup masyarakat. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan populasi dan pengembangan infrastruktur yang memiliki dampak masalah sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, analisis kondisi ketersediaan sarana-prasarana di Kabupaten Pelalawan sangat penting untuk memahami sejauh mana infrastruktur yang ada dapat menunjang kebutuhan masyarakat.

Selain itu, karakteristik pola pemukiman di Kabupaten Pelalawan juga perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan perkotaan. Pola pemukiman yang tidak tertata dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, pencemaran, dan penurunan tingkat kualitas lingkungan. Dengan memahami karakteristik pola pemukiman, perencanaan tata ruang yang lebih baik dapat dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Karakteristik desa dalam sistem perkotaan juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Desa yang terintegrasi dengan sistem perkotaan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis bagaimana desadesa di Kabupaten Pelalawan berinteraksi dengan kawasan perkotaan dan bagaimana mereka dapat bekerja sama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketersediaan sarana-prasarana, pola pemukiman, dan karakteristik desa dalam sistem perkotaan di Kabupaten Pelalawan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang lebih baik di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan berbasis pada analisis spasial melalui Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan pemodelan jangkauan pelayanan sarana serta penentuan hierarki wilayah secara matematis. Sementara itu, pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk menginterpretasi karakteristik pemukiman, pola adaptasi masyarakat, serta dinamika interaksi desa-kota secara mendalam melalui data tekstual. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, fenomena keruangan di Kabupaten Pelalawan dapat dibedah secara lebih komprehensif dan akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara terintegrasi melalui tiga tahapan utama, yaitu studi literatur, survei lapangan, dan wawancara. Tahap awal dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen statistik resmi seperti dokumen Kabupaten Pelalawan Dalam Angka serta laporan Potensi Desa. Data sekunder yang dihimpun meliputi data agregat jumlah penduduk per kecamatan, jumlah unit fasilitas pelayanan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, peribadatan), serta data spasial jaringan jalan. Selanjutnya, survei lapangan atau observasi langsung

dilakukan guna memvalidasi data spasial tersebut (*ground truthing*), memetakan titik koordinat fasilitas pelayanan publik, serta menilai kondisi fisik eksisting infrastruktur jalan dan morfologi pemukiman secara visual. Untuk memperdalam temuan lapangan, teknik wawancara terstruktur dan mendalam diterapkan kepada informan kunci dari instansi pemerintah terkait, aparatatur kecamatan atau desa, serta perwakilan masyarakat setempat yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*). Wawancara ini difokuskan pada penggalian informasi mengenai hambatan aksesibilitas geografis, penyesuaian tata ruang pemukiman, dan pola hubungan ketergantungan ekonomi antarwilayah.

Setelah seluruh data terkumpul dan divalidasi, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan teknis yang saling berkaitan. Analisis jangkauan pelayanan sarana dilakukan menggunakan pemodelan *buffering* pada perangkat lunak SIG untuk mengidentifikasi radius area pengaruh sarana pendidikan dan kesehatan terhadap pemukiman penduduk.

Untuk menentukan struktur hierarki pusat pelayanan di Kabupaten Pelalawan, digunakan analisis skalogram dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan mengonversi seluruh fasilitas ke dalam *matriks Present-Absent* (nilai 1 dan 0), sehingga kecamatan-kecamatan dapat diklasifikasikan ke dalam orde atau hirarki tertentu. Analisis jaringan jalan kemudian dilakukan untuk menghitung persentase kinerja infrastruktur berdasarkan jenis permukaan jalan (aspal, beton, kerikil, tanah) dan pengaruhnya terhadap konektivitas wilayah.

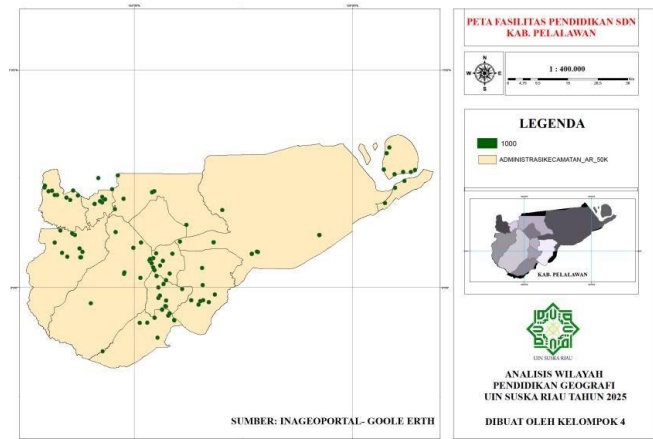
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memberikan narasi yang mendalam mengenai alasan di balik terbentuknya karakteristik pemukiman dan dinamika hambatan pembangunan di wilayah tersebut.

Hasil dan Diskusi

Analisis sarana dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan Skalogram untuk mengukur hierarki pusat-pusat pertumbuhan pembangunan berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi di 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan keragaman jenis fasilitas, wilayah kabupaten terbagi menjadi beberapa tingkatan orde:

Hierarki 1 (Pusat Pelayanan Utama): Kecamatan Pangkalan Kerinci, Ukui, Bunut, dan Bandar Petalangan. Kawasan ini merupakan wilayah paling maju dengan total ketersediaan hingga 28 jenis fasilitas pelayanan serta nilai IPD yang tinggi, sehingga berfungsi sebagai motor pertumbuhan wilayah.

Hierarki 3 (Wilayah Pelayanan Terbatas): Kecamatan Langgam, Bandar Sei Kijang, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kuala Kampar, Kerumutan, dan Teluk Meranti. Kecamatan-kecamatan ini memiliki keterbatasan jumlah jenis fasilitas umum dan nilai IPD di bawah rata-rata.



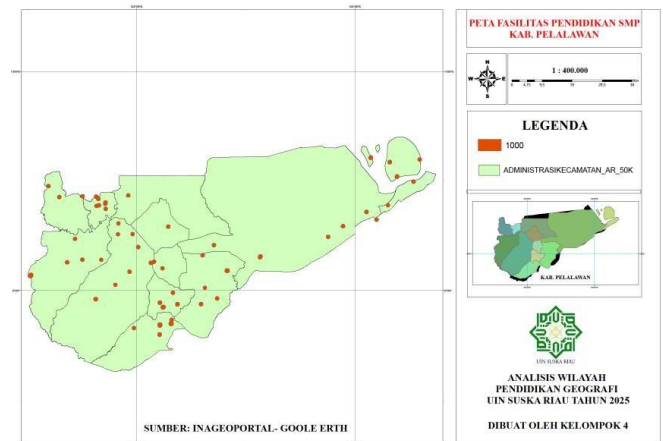
Gambar 1. Fasilitas Pendidikan SD Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil analisis spasial pada Peta Fasilitas Pendidikan SDN di Kabupaten Pelalawan, terlihat jelas adanya ketidakmerataan jumlah unit Sekolah Dasar Negeri di setiap kecamatan. Konsentrasi bangunan sekolah dasar menumpuk secara masif di daerah pusat pemerintahan dan koridor jalan utama, seperti di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

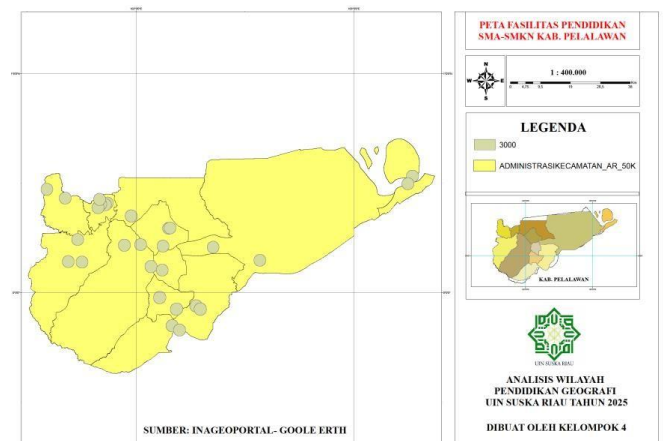
Sebaliknya, wilayah-wilayah yang letak geografisnya jauh dari pusat kota, terutama di bagian barat dan selatan kabupaten, memiliki jumlah SDN yang sangat minim. Kesenjangan spasial ini dipengaruhi oleh faktor sulitnya aksesibilitas transportasi, rendahnya kepadatan penduduk lokal, hambatan geografis berupa kawasan hutan atau rawa, serta program pembangunan infrastruktur pendidikan dasar yang belum tersebar secara proporsional.

Peta Fasilitas Pendidikan SMP di Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola sebaran yang sedikit lebih merata jika dibandingkan dengan sebaran sekolah tingkat atas, namun polanya tetap mengelompok pada zona-zona urban tertentu. Kecamatan Pangkalan Kerinci dan kawasan yang berdekatan dengan pusat administrasi daerah mendominasi jumlah sekolah menengah pertama.

Kondisi tersebut berkorelasi langsung dengan tingginya konsentrasi jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan wilayah perkotaan perkotaan. Sementara itu, daerah perbatasan antarkabupaten dan kawasan pedalaman masih mengalami defisit fasilitas SMP, yang memaksa anak-anak lulusan SD menempuh jarak jauh untuk melanjutkan pendidikan.



Gambar 2. Fasilitas Pendidikan SMP Kabupaten Pelalawan



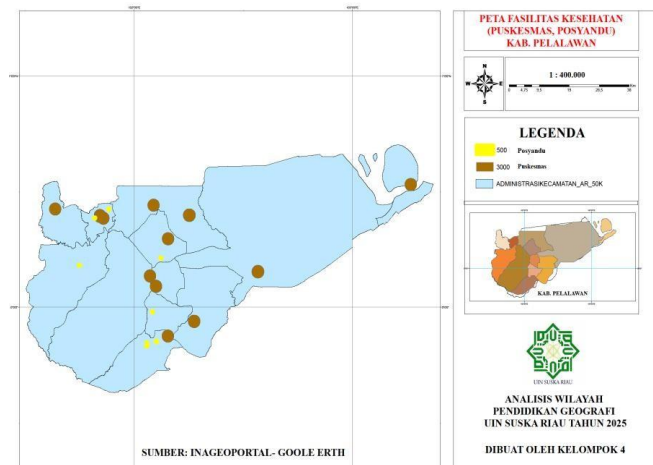
Gambar 3. Fasilitas Pendidikan SMA-SMK Kabupaten Pelalawan

Peta Fasilitas Pendidikan SMA-SMK Kabupaten Pelalawan, terlihat penyusutan jumlah unit sekolah yang semakin timpang pada jenjang pendidikan menengah atas. Dikarenakan fungsi pelayanannya yang lebih tinggi, fasilitas SMA dan SMK didominasi penuh oleh kawasan perkotaan inti ekonomi.

Kecamatan dengan hierarki rendah di pesisir atau pedalaman seperti Kuala Kampar dan Teluk Meranti menunjukkan keterbatasan akses pelayanan sekolah menengah atas. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan tata ruang pendidikan agar pembangunan SMA/SMK baru diarahkan ke wilayah pelosok demi meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat lanjut.

Peta Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pelalawan menyajikan sebaran sarana medis mulai dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Poliklinik, hingga Apotek. Berdasarkan data peta, fasilitas rumah sakit umum dan spesialis hanya bertumpu di Kecamatan Pangkalan Kerinci (mencapai angka pembobotan medis yang signifikan). Di sisi lain, kecamatan luar hanya ditunjang

oleh Puskesmas Tanpa Rawat Inap atau Poliklinik dengan kapasitas operasional terbatas.



Gambar 4. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

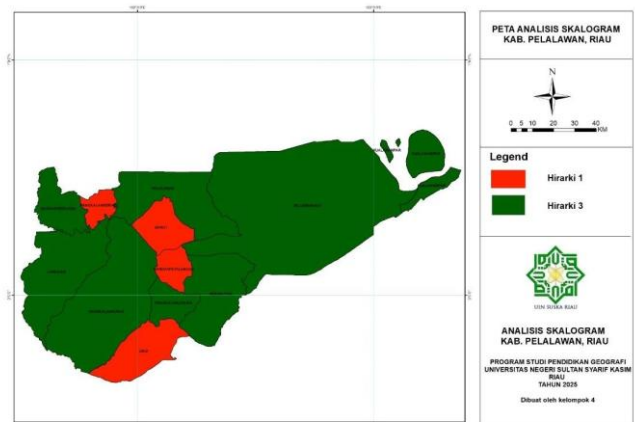
Ketimpangan fasilitas kesehatan darurat ini memperpanjang waktu tempuh (*travel time*) bagi masyarakat pedesaan di wilayah selatan dan pesisir saat membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut.



Gambar 5. Fasilitas Pasar Kabupaten Pelalawan

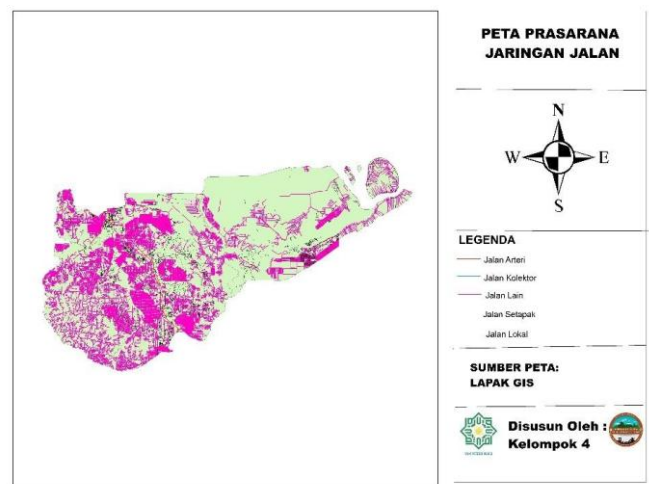
Berdasarkan Peta Fasilitas Pasar Kabupaten Pelalawan, aktivitas komersial perdagangan formal maupun tradisional memiliki polarisasi keruangan yang kontras. Pusat grosir, swalayan modern, dan minimarket berantai tumbuh subur di wilayah koridor Pangkalan Kerinci. Sementara itu, wilayah *hinterland* seperti Langgam, Bunut, dan Kerumutan sangat bergantung pada keberadaan pasar tradisional mingguan (pasar kaget) untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Peta ini menegaskan bahwa struktur ekonomi komersial Kabupaten Pelalawan masih sangat sentralistik. Peta Analisis Skalogram Kabupaten Pelalawan merupakan peta sintesis yang merangkum hasil klasifikasi hierarki fungsional dari seluruh wilayah kecamatan. Peta ini dengan jelas memetakan zonasi

spasial di mana kluster wilayah fungsional utama (Hierarki 1) diberi warna pembeda yang kontras di Pangkalan Kerinci, Ukui, Bunut, dan Bandar Petalangan berkat kelengkapan integrasi sarana sosial-ekonominya.



Gambar 6. Analisa Skalogram Kabupaten Pelalawan

Visualisasi peta ini membuktikan secara ilmiah terjadinya disparitas spasial nyata antara pusat pertumbuhan utara-tengah dengan delapan kecamatan lain yang terjebak pada zona pelayanan terbatas (Hierarki 3). Analisis prasarana transportasi darat dihitung menggunakan rumusan persentase panjang, fungsi, kondisi fisik, serta jenis permukaan jaringan jalan di 12 kecamatan.

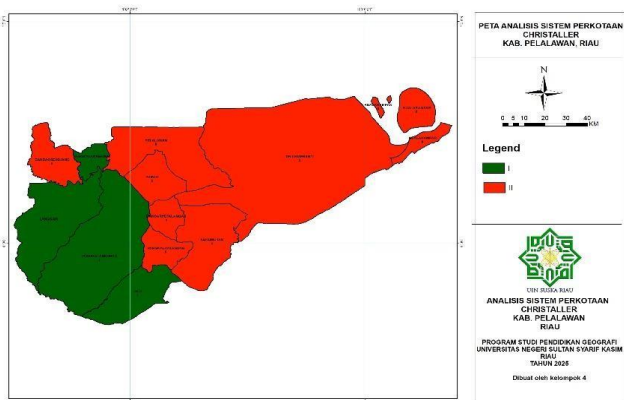


Gambar 7. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peta Prasarana Jaringan Jalan Kabupaten Pelalawan, terlihat klasifikasi jalan di kabupaten ini didominasi secara mutlak oleh "Jalan Lain" (jalan lingkungan atau jalan desa). Berdasarkan data riil, Kecamatan Pangkalan Kuras memimpin panjang Jalan Lain sebesar 4.230 km (89%) dan Teluk Meranti sepanjang 3.262 km (71%). Peta juga memperlihatkan kelangkaan rute "Jalan Kolektor" yang

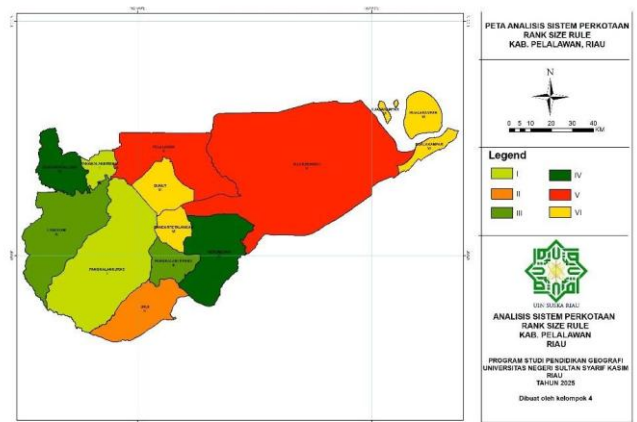
berfungsi mengikat arus pergerakan sekunder, di mana jalan tipe ini hanya tersedia di Pangkalan Kuras sepanjang 11 km. Ditinjau dari aspek kondisi fisik, mayoritas rute jalan utama di dalam peta berada pada status "Baik", seperti di Teluk Meranti (99%) dan Pangkalan Kerinci (83%). Namun, zona jalan dengan status "Sedang" dan "Rusak Ringan" terpantau masih meluas di daerah pedalaman seperti Kecamatan Kerumutan yang menyumbang persentase kerusakan ringan sebesar 22%.

Dari aspek material permukaan, peta ini mengonfirmasi dominasi perkerasan jalan Kerikil dan Tanah di sebagian besar kecamatan luar. Sebagai contoh, jalan permukaan tanah menguasai 100% jalur transportasi di Kuala Kampar (73,24 km) dan 82% di Teluk Meranti. Sebaliknya, permukaan Aspal yang mantap baru terkonsentrasi di kawasan perkotaan Pangkalan Kerinci sebesar 48% (99,15 km). Kelemahan struktural prasarana jalan kerikil dan tanah ini menyebabkan kerentanan tinggi terhadap kerusakan akibat curah hujan tinggi serta beban tonase kendaraan logistik industri. Berdasarkan hasil dari pemetaan terdapat beberapa analisis dalam karakteristik pola pemukiman dan sistem perkotaan.



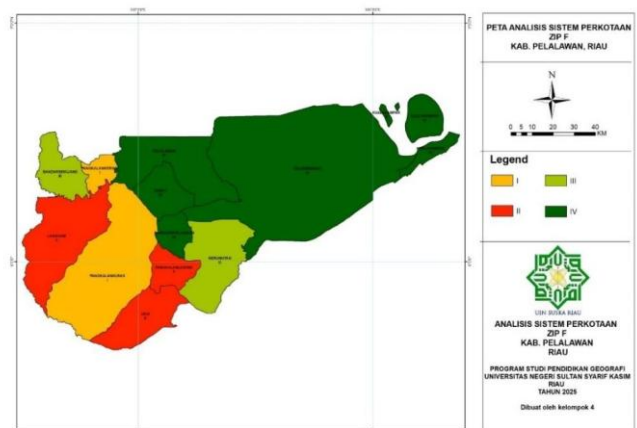
Gambar 8. Analisa Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Christaller Kabupaten Pelalawan.

Peta Hasil Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Christaller memvisualisasikan jangkauan pelayanan (range) dan ambang batas (threshold) teoritis dari pusat-pusat permukiman di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan pendekatan geometris heksagonal Christaller, Pangkalan Kerinci menempatkan diri sebagai tempat sentral berorde tinggi yang melayani kebutuhan barang-barang tersier bagi wilayah sekitarnya. Peta ini menunjukkan bentuk pola pelayanan yang belum ideal menyerupai asas pasar optimal ($K=3$), mengingat hambatan jarak dan sebaran penduduk yang asimetris membuat beberapa kecamatan di lingkaran luar sulit menjangkau wilayah pusat pelayanan utama.



Gambar 9. Analisa Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Rank Size Rule Kabupaten Pelalawan.

Peta Hasil Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Rank Size Rule (Hukum Ukuran-Peringkat), disajikan perbandingan antara jumlah penduduk riil antarkecamatan terhadap peringkat idealnya. Melalui gradasi warna peta, terlihat distorsi ukuran kota yang mencolok. Jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci yang mencapai 103.882 jiwa melompat terlalu jauh dibanding peringkat kedua yaitu Pangkalan Kuras (67.219 jiwa) dan kecamatan terkecil seperti Bunut (15.825 jiwa). Peta ini membuktikan secara empiris bahwa distribusi ukuran kota-kota di Kabupaten Pelalawan belum mengikuti kaidah linearitas Rank Size Rule yang seimbang.



Gambar 10. Analisa Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Zipf Kabupaten Pelalawan.

Peta Hasil Kriteria Orde Kota berdasarkan Metode Zipf mempertegas fenomena konsentrasi atau terjadinya kelebihan primasi (primacy index) di wilayah utara kabupaten. Berdasarkan analisis Hukum Zipf yang digambarkan pada peta, Kabupaten Pelalawan mengarah pada sistem perkotaan yang monosentris, di mana Pangkalan Kerinci bertindak sebagai kota primat

tunggal yang menyerap perputaran modal, arus urbanisasi, dan pembangunan sarana-prasarana secara berlebihan, sehingga menekan laju pertumbuhan kota-kota satelit kecil di sekelilingnya.

Berdasarkan kategori orde kota di atas, maka di perolehlah orde kota di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. kategori orde setiap Wilayah di kabupaten pelalawan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Status Perkotaan	Orde
Pangkalan Kerinci	103.882	Perkotaan	I
Pangkalan Kuras	67.219	Perkotaan	I
Ukui	41.691	Perkotaan	II
Langgam	35.782	Perkotaan	II
Pangkalan Lesung	29.906	Perkotaan	II
Kerumutan	25.319	Perkotaan	III
Bandar Sei Sekijang	21.780	Perkotaan	III
Pelalawan	20.339	Perkotaan	IV
Teluk Meranti	18.428	Perkotaan	IV
Kuala Kampar	18.129	Perkotaan	IV
Bandar Petalangan	17.169	Perkotaan	IV
Bunut	15.825	Perkotaan	IV

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kondisi ketersediaan sarana-prasarana, karakteristik pola permukiman, serta sistem perkotaan di Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan keruangan (*spatial disparity*) yang cukup signifikan antarkecamatan. Melalui pendekatan fungsional metode Skalogram, wilayah Kabupaten Pelalawan terpolarisasi secara tajam ke dalam dua kutub pelayanan, yakni wilayah Hierarki 1 yang mencakup Kecamatan Pangkalan Kerinci, Ukui, Bunut, dan Bandar Petalangan sebagai kawasan dengan keragaman sarana sosial-ekonomi paling lengkap, serta

delapan kecamatan lainnya yang terjebak dalam wilayah Hierarki 3 dengan tingkat ketersediaan fasilitas publik yang sangat terbatas. Pusat-pusat pelayanan vital seperti fasilitas pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah atas, fasilitas kesehatan, dan sarana komersial berupa pasar atau swalayan modern terpantau masih mendominasi kawasan perkotaan utama dan belum terdistribusi secara proporsional ke wilayah pedalaman maupun pesisir.

Kondisi ketimpangan sarana tersebut diperparah oleh keterbatasan prasarana transportasi darat, di mana jaringan jalan di Kabupaten Pelalawan secara kuantitas masih didominasi secara mutlak oleh klasifikasi Jalan Lain atau jalan lingkungan desa, sementara ketersediaan Jalan Kolektor yang berfungsi sebagai pengikat konektivitas antarwilayah sangat minim. Meskipun tingkat kemantapan fisik jalan di beberapa kecamatan utama sudah dikategorikan dalam kondisi baik, material permukaan jalan di daerah hinterland, seperti di Kecamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti, sebagian besar masih berupa kerikil dan tanah. Karakteristik permukaan jalan yang belum mantap ini memicu kerentanan struktural yang tinggi terhadap kerusakan akibat curah hujan atau beban tonase logistik industri, sehingga berdampak pada tingginya biaya logistik serta lamanya waktu tempuh (*travel time*) bagi masyarakat di luar pusat kota untuk mengakses pusat pelayanan publik.

Dari perspektif makro sistem perkotaan, pengujian melalui tiga metode orde kota, yaitu Teori Tempat Sentral Christaller, Rank Size Rule, dan Hukum Zipf, mengonfirmasi bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki struktur keruangan yang bersifat monosentris dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci bertindak sebagai kota primat tunggal (*primate city*). Jumlah penduduk dan konsentrasi pembangunan prasarana di Pangkalan Kerinci melompat terlalu jauh mengungguli kota-kota peringkat di bawahnya, seperti Pangkalan Kuras maupun Bunut. Fenomena kelebihan primasi (*primacy index*) ini menyebabkan terjadinya polarisasi pertumbuhan yang tidak seimbang, di mana wilayah perkotaan inti menyerap perputaran modal dan arus urbanisasi secara berlebihan, sedangkan wilayah lingkaran luar mengalami stagnasi perkembangan akibat hambatan jarak geografis serta jangkauan pelayanan (*range*) yang belum optimal.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Almegi, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah di Program Studi Pendidikan Geografi UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas bimbingan dan arahnya. Apresiasi tinggi juga ditujukan kepada

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan atas penyediaan data "Kecamatan dalam Angka", serta seluruh anggota atas kerja sama dan dedikasinya dalam penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- BPS. 2022. Kecamatan Bandar Pertalangan dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Bandar Sei Kijang dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Bunut dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Kerumutan dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Kuala Kampar dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Langgam dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Pangkalan Kuras dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Pangkalan Lesung dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Pelalawan dalam Angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Teluk Meranti dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- BPS. 2022. Kecamatan Ukui dalam angka. BPS Kabupaten Pelalawan: Kabupaten Pelalawan.
- <https://earth.google.com/-kab.Pelalawan-diambil> pada 20 Mei 2025.